

LAPORAN KINERJA

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA**

DINAS KESEHATAN

**JLN. HAJORAN-BATU TAMBUN KM 3
GUNUNGTUA**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diamanatkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai wahana untuk melaksanakan akuntabilitas adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Guna memenuhi kewajiban tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun LAKIP Tahun 2023 dari semua kegiatan dari berbagai sumber dana yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Harapan kami dengan telah rampungnya penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya oleh Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun LAKIP atas kerja kerasnya sehingga LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 rampung sesuai jadwal. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Sekretaris, Para Kepala Bidang dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kontribusi dan informasinya.

Disadari bahwa LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita, Aamiin.

Gunungtua, 16 Maret 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



dr. Sri Prihatin KN Harahap, M.K.M
PEMBINA Tk.I
NIP. 197608212009072001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Penjelasan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4
1.3 Permasalahan Utama	9
1.4. Dasar Hukum	10
1.5. Sistematika laporan	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	17
2.3. Perjanjian Kinerja	41
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Capaian Kinerja	42
3.2. Realisasi Anggaran	49
BAB IV. PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk perwujudan akuntabilitas publik atas keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan perlu disampaikan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Sekretariat selaku unsur pembantu pimpinan, diharuskan selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Pada perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, capaian tujuan serta sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi wilayah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah

ditetapkan.

1.2 PENJELASAN UMUM DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari system Pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Ibu dr.Sri Prihatin KN Harahap,M.K.M sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana . Kepala Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Kepala Dinas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN

Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :

- I. Sekretaris Dinas Kesehatan;
 - a. Sekretaris Dinas Kesehatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
 2. Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana
- II. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- III. Bidang Penvegahan dan pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- IV. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- V. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- VI. UPTD Daerah

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai berikut :

I. Sekretaris Dinas Kesehatan

Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

II. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas Masyarakat

Sub Bagian Program, Informasi dan Humas Masyarakat mempunyai tugas

- a. penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

III. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

- a. penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

IV. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

V. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan olah raga.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

VI. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

VII. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IX. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kepala Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

1.2.3 JUMLAH PEGAWAI ASN

Jumlah pegawai ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara per Desember Tahun 2023 adalah sebanyak 931 orang, terdiri dari 806 orang Pegawai Laki-laki dan 125 Orang Pegawai Perempuan. Berikut Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1

Jumlah pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kualitas Pendidikan	Jumlah	
1	2	3	
1	SD	0	Orang
2	SLTP	3	Orang
3	SLTA	82	Orang
4	Diploma (D1,D2,D3)	502	Orang
5	Sarjana (S1)	329	Orang
6	Pasca Sarjana (S2)	15	Orang
7	Doktoral (S3)	-	Orang
Jumlah		931	Orang

2. Menurut Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	Golongan	Jumlah	
1	2	3	
1	I	-	Orang
2	II	389	Orang
3	III	507	Orang
4	IV	35	Orang
Jumlah		931	Orang

3. Menurut Eselon / Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai menurut Eselon/Jabatan

N O	Eselon / Jabatan	Jumlah	
1	2	3	
1	I	0	Orang
2	II	1	Orang
3	III	9	Orang
4	IV	9	Orang
5	Staff	39	Orang
6	Fungsional	873	Orang
Jumlah		931	Orang

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkaitan dengan pelayanan antara lain : terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut atas evaluasi tersebut. Kesenjangan capaian kinerja secara umum terlihat dari : masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak, masih rendahnya status gizi masyarakat, masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKjIP adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88);
- g. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 PENJELASAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
- 1.3 PERMASALAHAN UTAMA
- 1.4 DASAR HUKUM
- 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

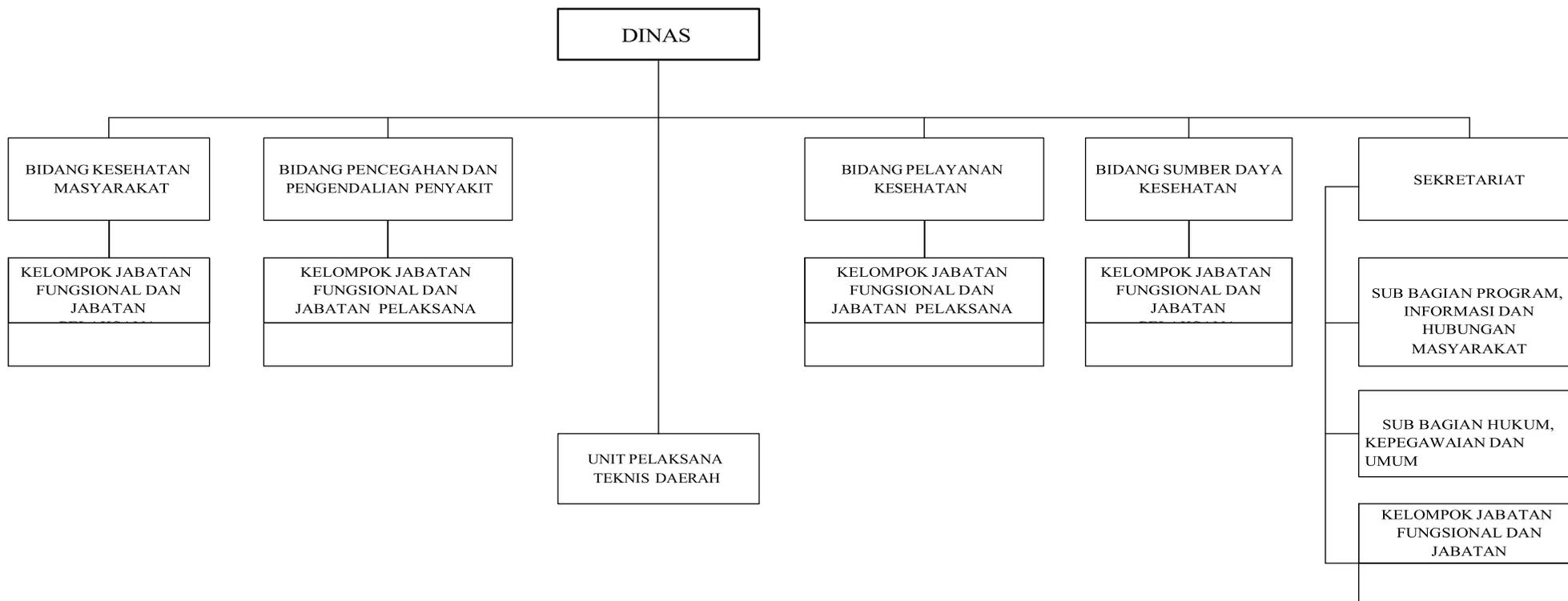
- 2.1 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
- 3.2 REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TIPE A



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

Tujuan jangka menengah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sasaran jangka menengah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dengan mengoperasikan Visi dan Misi Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 5777 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET			SUMBER DATA
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	2021	2022	2023	7
	Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat	Sasaran RPJMD : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IKU KABUPATEN Angka Harapan Hidup	Jumlah Rata-rata Umur Harapan Hidup Penduduk Kab. Padang Lawas Utara	BPS	67.52	67.76	68	
	Tujuan OPD : 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran OPD : 1. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak 2. Meningkatkan status gizi masyarakat 3. Menurunnya angka kesakitan	IKU OPD 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	6.696/7.878 x 100% (85%)	6.933/7.878 x 100% (88%)	7.090/7.878 x 100% (90%)	Bidang Bina kesehatan Masyarakat dan P2P
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	6.768/7520 x 100% (90%)	6.994/7520 x 100% (93%)	7.144/7520 x 100% (95%)	Bidang Bina kesehatan Masyarakat	
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	6446/7162 x 100% (90%)	6.660/7162 x 100% (93%)	6804/7162 x 100% (95%)	Bidang Bina kesehatan Masyarakat dan P2P	
4. Pelayanan Kesehatan Balita			jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita di kabupaten/kota	39.280/49.100 x 100% (80%)	40.262/49.100 x 100% (82%)	41.735/49.100 x 100% (85%)	Bidang Bina kesehatan Masyarakat dan P2P	
5. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			jumlah orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi	jumlah orang usia 15 - 59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten/kota	12864/169.080 X 100% (80%)	12864/169.080 X 100% (80%)	12864/169.080 X 100% (80%)	P2P	
6. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	15.567/21.621 x 100% (72%)	16.216/21.621 x 100% (75%)	17.297/21.621 x 100% (80%)	Bidang Bina kesehatan Masyarakat	

Tabel 2.2
Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja jangka Menengah Dinas
Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Target Kinerja		
			2021	2022	2023
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	85	88	90
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	90	93	95
		Pelayanan bayi baru lahir	90	93	95
		Pelayanan kesehatan Ibu Nifas	100	100	100
	Meningkatnya status gizi masyarakat	Cakupan Pelayanan anak balita	80	82	85
		Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100	100
	Menurunnya angka kesakitan	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	80	80	80
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	72	75	80
		Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Penderita Tuberculosis	100	100	100
		Pelayanan orang dengan gangguan Jiwa Berat	100	100	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023 (dari renja tahun 2023)

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana kerja tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugasnya. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023											
1	0 1	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		SKPD PENAN GGUNG JAWAB
				KELOM POK SASARA N	LOKASI	TAR GET CAP AIAN KINE RJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARG ET CAPA IAN KINE RJA	PAGU INDIKATIF	
0 1	0 2	PROGRAM URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG PEMERINTAHAN				78.025.417.535				Dinkes
0 1	0 9	Perencanaan Penganngaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					331.485.400			272.604.600,00	Dinkes
0 1	1 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	2 dokumen	25.0000.000	DAU	2 dokumen	25.000.000,00	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	1 dokumwn	29.999.600	DAU	1 dokumwn	29.999.600,00	Dinkes
---	---	---	--	-----------------	--------------------	-----------	------------	-----	-----------	---------------	--------

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaporan tersedia	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	1 dokumwen	276.485.800	DAU	1 dokumen	217.605.000	Dinkes
01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.744.486.712			67.915.796.156,00	Dinkes
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	12 bulan	71.333.126.712	DAU	12 bulan	67.494.796.156,00	Dinkes
01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima Honor	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	67 orang	411.360.000	DAU	67 orang	421.000.000,00	Dinkes
01	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.265.969.800		1.307.959.100,00	1.307.959.100,00	Dinkes
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	20 jenis	59.233.5000	DAU	59.233.500,00	59.233.500,00	Dinkes
01	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah jenis ATK	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	55 jenis	407.868.500	DAU	392.080.000,00	392.080.000,00	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Perlengkap an Kantor									
0 2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	50 jenis	48.080.100	DAU	48.080.100,00	48.080.100,00	Dinkes
0 2	0 5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Tamu Dan Rapat Yang Disediakan	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	6020 kotak	99.320.000	DAU	99.320.000,00	99.320.000,00	Dinkes
0 2	2 2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak, jumlah barang yang digandakan	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	48 jenis	110.959.700	DAU	112.443.500,00	112.443.500,00	Dinkes
0 2	2 4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	3025 Exl	40.000.000	DAU	40.000.000,00	40.000.000,00	Dinkes
0 2	2 6		Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	762 kali	500.508.000	DAU	556.802.000,00	556.802.000,00	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

05			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					113.997.600			25.493.800,00	Dinkes
15			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	3 jenis	25.493.800	DAU	3 jenis	25.493.800,00	Dinkes
15	02		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			Padang Lawas Utara		3.953.348.023			4.317.362.181,00	Dinkes
15	06		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	11900 lembar	54.964.600	DAU	11900 lembar	54.964.600,00	Dinkes
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik,air,telepon dan air	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	12 bulan	425.780.500	DAU	12 bulan	545.780.000,00	Dinkes
			Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah Personal Computer/Not	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	20 orang	3.472.602.923	DAU	20 orang	3.716.617.581,00	Dinkes

			dan Perlengkapan Kantor	ebook dan Printer yang di Service								
16	13		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Padang Utara	Lawas	581.130.000			581.130.000,00	Dinkes
16			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	23 unit	533.770.000	DAU	533.770.000,00	533.770.000	Dinkes
16			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Di Pelihara	Dinas Kesehatan	Padang Lawas Utara	5 unit	47.360.000		47.360.000,00	47.360.000	Dinkes
16			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					59.047.330.400			61.880.031.361,00	
16			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					17.927.608.700			18.020.270.200,00	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Masyarakat	Padang Lawas Utara	1 Unit	100.000.000	DAU	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinkes
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Masyarakat	Padang Lawas Utara	1 Unit	129.311.200	DAU	129.311.200,00	129.311.200,00	Dinkes
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes yang tersedia	Masyarakat	Padang Lawas Utara	17 unit	12.436.448.000	DAU	12.436.448.000,00	12.436.448.000,00	Dinkes
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin	Masyarakat	Padang Lawas Utara	17 unit	1.719.922.970	DAU	1.719.924.000,00	1.719.924.000,00	Dinkes
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BHP	Masyarakat	Padang Lawas Utara	17 Unit	3.369.466.130	DAU	3.369.305.000,00	3.369.305.000,00	Dinkes
16			Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Masyarakat	Padang Lawas Utara	250 kali	50.000.000	DAU	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Distribusi Alat Kesehatan , Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai [BMHP], Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Pelayanan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan , Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai [BMHP], Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Pelayanan Lainnya	Masyarakat	Padang Lawas Utara	250 kali	122.460.400	DAU	122.517.000,00	122.517.000,00	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Masyarakat	Padang Lawas Utara	200 KK	-	DAU	92.765.000,00	92.765.000,00	Dinkes
16			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					29.036.211.639			43.174.444.161,00	Dinkes
16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	7500 orang	315.145.600	DAU	198.365.800	198.365.800	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

1 6			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	7500 borang	708.280.000	DAU	7500 borang	749.932.000	Dinkes
			Pengelolaan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	7100 orang	81.700.000	DAU	7100 orang	149.307.000	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	27000 orang	100.000.000	DAU	27000 orang	100.000.000	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Usia Pendidikan Dasar mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	35000 siswa	120.000.000	DAU	35000 siswa	120.000.000	Dinkes
1 6	2 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	170 remaja	140.000.000	DAU	170 remaja	140.000.000	Dinkes
1 6	2 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Persentase Usia kesehatan pada usia lanjut	Masyarakat	Padang Lawas Utara	50.000 orang	99.999.800	DAU	50.000 orang	87.772.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Lanjut	mendapat pelayanan sesuai standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Pasien Hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	500 orang	39.000.000	DAU	500 orang	39.000.000	Dinkes
1 6	3 0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Pasien Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	500 orang	45.000.000	DAU	500 orang	45.000.000	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Yang mendapat Pelayanan sesuai Standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 orang	35.000.000	DAU	100 orang	35.000.000	Dinkes
1 6	3 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang yang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 orang	186.431.300	DAU	100 orang	186.431.300	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

1 7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	30 orang	109.964.000	DAU	30 orang	109.964.000	Dinkes
1 7	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk terdampak bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 %	137.000.000	DAU	100 %	137.000.000	Dinkes
1 7	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Gizi sesuai Standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 %	225.270.100	DAU	100 %	225.216.100	Dinkes
1 7	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 %	192.918.800	DAU	100 %	179.951.800	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Olah raga	kesehatan kerja dasar								
17	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peresentase RT Yang menghuni Rumah Sehat	Masyarakat	Padang Lawas Utara	5 Dokumen	287.010.000	DAU	5 Dokumen	1.001.671.400	Dinkes
19	12		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase RT ber PHBS	Masyarakat	Padang Lawas Utara	4 Dokumen	461.050.900	DAU	4 Dokumen	488.108.800	Dinkes
19	13		Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase tenaga kesehatan yang dibina terkait pelayanan kesehatan tradisional, asuhan mandiri dan tardisional lainnya	Masyarakat	Padang Lawas Utara	1 Dokumen	60.000.000	DAU	1 Dokumen	60.000.000	Dinkes
20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Jumlah Bayi, Balita Yang mendapat Pelayanan Imunisasi	Masyarakat	Padang Lawas Utara	2 Dokumen	282.760.000	DAU	2 Dokumen	282.760.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

20			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Yang mendapat Pelayanan sesuai Standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	90 orang	139.390.100	DAU	90 orang	139.357.100	Dinkes
20	6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	10 orang	45.000.000	DAU	10 orang	45.000.000	Dinkes
20	13		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan haji	Masyarakat	Padang Lawas Utara	3 Dokuemn	300.622.800	DAU	3 Dokuemn	345.622.800	Dinkes
20	14		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca	Persentase orang yang terdampak krisis Kesehatan	Masyarakat	Padang Lawas Utara	2 Dokumen	222.000.000	DAU	2 Dokumen	222.000.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Krisis Kesehatan	yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan akibat bencana / Potensi bencana								
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase orang penyakit menular dan tidak menular yang dilayani sesuai standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	5 Dokuemn	367.776.700	DAU	5 Dokuemn	367.776.700	Dinkes
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk yg menjadi peserta JKN	Masyarakat	Padang Lawas Utara	3 Dokumen	15.077.890.200	DAU	3 Dokumen	16.901.392.261	Dinkes
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Orang dengan Penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan Sekolah yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	200 orang	82.609.900	DAU	200 orang	90.441.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Masyarakat	Padang Lawas Utara	17 Dokumen	20.102.633.000	DAU	17 Dokumen	20.102.632.600	Dinkes
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Masyarakat	Padang Lawas Utara	6 Unit	232.896.000	DAU	6 Unit	417.971.200	Dinkes
		Investigasi Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Masyarakat	Padang Lawas Utara	5 Laporan	100.000.000	DAU	5 Laporan	1000.000.000	Dinkes
21		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Jumlah Kasus Penyakit yang berpotensi Wabah / KLB yang ditanggulangi	Masyarakat	Padang Lawas Utara	2 Dokumen	61.737.300	DAU	2 Dokumen	61.737.300	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Masyarakat	Padang Lawas Utara	1 Unit	45.000.000	DAU	1 Unit	45.000.000	Dinkes	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						119.000.000			119.000.000	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Masyarakat	Padang Lawas Utara	1 dok	119.000.000	DAU	1 dok	119.000.000	Dinkes	
2 1	1		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						566.317.000			566.317.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

2 1	1 0	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Masyarakat	Padang Lawas Utara	150.578.000	208.092.000	DAU	1 RSUD	150.578.000	Dinkes
2 2		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Masyarakat	Padang Lawas Utara	415.739.000	338.593.200	DAU	4 Unit	415.739.000	Dinkes
2 2	1 6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.119.496.400			1.119.496.400	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

		Pemberian ijin praktek tenaga kesehatan wilayah kabupaten/kota					50.000.000			50.000.000	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang dibin dan memeiliki izin	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 %	50.000.000	DAU	100 %	50.000.000	Dinkes
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/					1.069.496.400			1.069.496.400	

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

		Kota									
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan	Masyarakat	Padang Lawas Utara	80 orang	1.069.496.400 a	DAU	80 orang	1.069.496.400	Dinkes
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					302.244.000			302.244.000	
2	2	Pemberian Produk Perbekalan	Sertifikat untuk Sarana Kesehatan tertentu dan Kesehatan				155.050.000			155.050.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

			Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
2	2		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Perusahaan Rumah Tangga yang memehuhi persyaratan	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 %	155.050.000	DAU	100 %	155.050.000	Dinkes
2	2	4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					147.194.000			147.194.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

		Pemeriksaan Makanan-Min Tangga yang serta Tindak L	Persentase P-IRT Yang disertifikasi	Masyarakat	Padang Lawas Utara	15 Sarana	147.194.000	DAU	15 Sarana	147.194.000	Dinkes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							601.470.500			732.976.400	
		Advokasi, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					121.450.000			121.450.000	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa siaga yang terebentuk	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100 %	121.450.000	DAU	100 %	121.450.000	Dinkes

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota					100.828.500			100.828.500	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kecamatan menerapkan Germas	Masyarakat Padang Lawas Utara	100 %	52.325.900	DAU	100 %	52.325.900	Dinkes	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Keluarga ber PHBS	Masyarakat Padang Lawas Utara	200 KK	48.502.600	DAU	200 KK	48.502.600	Dinkes	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah					379.192.000			510.697.900	

Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

		Kabupaten/Kota								
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Posyandu Aktif)	Masyarakat	Padang Lawas Utara	100%	379.192.000	DAU	100%	510.697.900	Dinkes

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk Menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara 2019-2023 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023,

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada tanggal 27 Januari 2023. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara, maka dilakukan perubahan PK pada tanggal November 2023. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harahap Hidup	Angka Harahap Hidup	68	68
Meningkatkan Kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan Kesehatan ibu dan anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka kematian Bayi	3,5	0.4
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Kematian Ibu	0,02	0,01
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93 %	95 %
Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Balita	Prevalensi Stunting	27,50 %	13 %

Laporan Kinerja Instansi Perjanjian Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

Menurunnya Angka Kesakitan	Menurunnya Angka Kesakitan	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas dengan Akreditasi Madya	3	3
		Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	75	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah kabupaten/Kota	78.025.417.535	74.420.345.837	APBD	PAPBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.454.036.500	43.267.209.161	APBD	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	601.470.500	732.976.400	APBD	PAPBD
	Jumlah	139.095.958.835	138.455.093.998		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi Capaian Kinerja}}{\% \text{ Target Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran skala ordinal seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target Indikator Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan dilakukan dengan Tabel berikut :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.1
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68	71,29	105%	BPS
2	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	90	100	111	Bidang Kesmas
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	95	100	105	Bidang Kesmas
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	95	100	105	Bidang Kesmas
3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Pelayanan kesehatan balita	85	100	117	Bidang Kesmas
4	Menurunkan angka kesakitan	Pelayanan kesehatan usia produktif	80	100	125	Bidang Kesmas
		Pelayanan Kesehatan usia lanjut	80	100	125	Bidang Kesmas

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.1.2
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	67,52	67,76	68	71,29	105%
2	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil			90	100	111
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin			95	100	105
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir			95	100	105
3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Pelayanan kesehatan balita			85	100	117

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
4	Menurunkan angka kesakitan	Pelayanan kesehatan usia produktif			80	100	125
		Pelayanan Kesehatan usia lanjut			80	100	125

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah

Tabel 3.1.3
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2023)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,29	68	105%
2	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100	90	111
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	95	105
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100	95	105
	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Pelayanan kesehatan balita	100	85	117
3	Menurunkan angka kesakitan	Pelayanan kesehatan usia produktif	100	80	125
		Pelayanan Kesehatan usia lanjut	100	80	125

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Table 3.1.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,29		
2	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100		
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100		
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100		
3	Meningkatkan Status Gizi	Pelayanan kesehatan balita	100		

	Masyarakat				
4	Menurunkan angka kesakitan	Pelayanan kesehatan usia produktif	100		
		Pelayanan Kesehatan usia lanjut	100		

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.1.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Reali sasi	% Capaian	Analisis Keberhasil an/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatkan derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68	71,29	105%		
2	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	90	100	111		
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	95	100	105		
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	95	100	105		
3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Pelayanan kesehatan balita	85	100	117		
4	Menurunkan angka kesakitan	Pelayanan kesehatan usia produktif	80	100	125		
		Pelayanan Kesehatan usia lanjut	80	100	125		

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien si
			Targ et	Rea lisa si	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatka n derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	68	71,29	105 %	2,097,772,100	2,050,857,300	105 %	
2	Meningkatka	Pelayanan Kesehatan Ibu	90	100	111	198.365.800	198.329.450	99,98	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
	n Kesehatan Ibu dan Anak	hamil							
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	90	100	111	749.932.000	745.071.100	99,35	
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	95	100	105	149.307.000	121.426.000	81,33	
3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Pelayanan kesehatan balita	95	100	105	100.000.000	98.787.150	98,79	
4	Menurunkan angka kesakitan	Pelayanan kesehatan usia produktif	85	100	117	140.000.000	133.490.000	95,35	
		Pelayanan Kesehatan usia lanjut	80	100	125	87.772.000	87.759.250	99,99	

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	105,25 %	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Penyediaan layanan Standart Pelayanan Minimal (SPM)bidang Kesehatan	83,59 %	Menunjang	Implementasi kebijakan standart pelayanan minimal bidang kesehatan
					Persentase peserta Jaminan Kesehatan	84,92 %	Menunjang	Masyarakat Kabupaten Padang Lawas utara memiliki Jaminan Kesehatan
					Persentase peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	72 %	Menunjang	Puskesmas yang sudah Terakreditasi

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatkan Derajat Kesehatn Masyarakat

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Angka Harapan Hidup[68	71,29	105%

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	90	100	111
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	95	100	105
Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	95	100	105

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan kegiatan Orientasi MPDN bertujuan agar Petugas mampu melaksanakan orientasi MPDN dengan dana Rp. 198.365.800 dan terealisasi Rp. 198.329.450 dengan persentase 99,98 %

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, pagu Rp. 749.932.000 dan realisasi Rp. 745.071.100 dengan persentase 99,35% dengan Target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan.

Pengelolaan Bayi Baru Baru Lahir, Pagu Rp. 149.307.000,- dan realisasi Rp. 121.426.000,-

denga persentasi 81,33% dengan kegiatan Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi dengan target 102 dengan realisasi sebanyak 102 petugas telah mengikuti surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi, dengan Persentase 81,33%

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatkan Status gizi masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pelayanan Kesehatan Balita	85	100	117

Pengelolaan Kesehatan Balita, Pagu Rp. 100.000.000,- dan realisasi Rp. 98.787.150,- dengan persentase 98.79%

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Sasaran 4
Menurunkan Angka Kesakitan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	80	100	125
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	80	100	125

Pemeriksaan kesehatan pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi seimbang dan pendidikan kesehatan Reproduksi pada anak usia sekolah dengan target 120 dan realisasi sebanyak 120 orang telah melakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi seimbang dengan Pagu Rp. 140.000.000 dan realisasi Rp. 133.490.000 dengan persentase 95.35%.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan Pagu Rp. 87.772.000 dan realisasi Rp. 87.759.250 dan persentase 99.9%. dengan 2 kegiatan

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.420.345.837,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	272.604.600,00	255.753.000,00	93,82
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	22.248.100,00	88,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.999.600,00	28.982.000,00	96,61
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.605.000	204.522.900,00	93,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.915.796.156,00	66.533.686.959,00	97,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.494.796.156,00	66.112.686.959,00	97,95
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.000.000,00	421.000.000,00	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.307.959.100,00	1.287.812.316,00	98,46
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.233.500,00	59.225.800,00	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	392.080.000,00	391.976.000,00	99,97
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.080.100,00	48.080.100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.320.000,00	98.242.750,00	98,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.443.500,00	112.338.800,00	99,91
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	556.802.000,00	537.948.866,00	96,61
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.493.800,00	25.493.800,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.493.800,00	25.493.800,00	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.317.362.181,00	4.291.261.843,00	99,40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.964.600,00	54.960.452,00	99,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	545.780.000,00	541.875.284,00	99,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.716.617.581,00	3.694.426.107,00	99,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.130.000,00	556.735.318,00	95,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	533.770.000,00	509.377.818,00	95,43
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.360.000,00	47.357.500,00	99,99
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.880.031.361,00	59.676.740.610,00	96,44
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.020.270.200,00	16.967.580.710,00	94,16
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	129.311.200,00	129.311.200,00	100
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.436.448.000,00	12.082.769.057,00	97,16
	Pengadaan Obat, Vaksin	1.719.924.000,00	1.520.313.088,00	88,39
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.369.305.000,00	2.882.380.015,00	85,55
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.650.000,00	99,30

Laporan Kinerja Instansi Perjanjian Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

Distribusi Alat Kesehatan , Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai [BMHP], Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Pelayanan Lainnya	122.517.000,00	120.254.100,00	98,15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	92.765.000,00	82.903.250,00	89,37
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.174.444.161,00	42.037.146.250,00	97,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	198.365.800	198.329.450	99,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	749.932.000	745.071.100	99,35
Pengelolaan Bayi Baru Lahir	149.307.000	121.426.000	81,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	98.787.150	98,79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	120.000.000	119.067.000	99,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	140.000.000	133.490.000	95,35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	87.772.000	87.759.250	99,99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.000.000	37.094.900	95,12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	45.000.000	42.492.000	94,43
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orng dengan Gangguan Jiwa Berat	35.000.000	34.894.500	99,70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	186.431.300	186.388.800	99,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	109.964.000	109.941.250	99,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	137.000.000	136.115.649	99,35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.216.100	224.571.900	99,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	179.951.800	179.499.500	99,75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.001.671.400	1.000.024.894	99,84
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	488.108.800	486.017.400	99,57
Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	53.185.500	88,64
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	282.760.000	281.919.000	99,70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	139.390.100	139.357.100	99,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.000.000	44.533.000	98,96
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	345.622.800	344.111.455	99,56
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	222.000.000	221.774.000	99,90
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	367.776.700	362.798.750	98,65
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.901.392.261	16.625.714.021	98,37
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	90.441.000	90.321.000	99,87
Operasional Pelayanan Puskesmas	20.102.632.600	19.362.641.466	96,32
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	417.971.200	369.461.615	88,39
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	1000.000.000	99.898.000	99,90
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	61.737.300	61.267.300	99,24
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	45.000.000	39.193.300	87,10

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	119.000.000	114.735.000	96,42
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	119.000.000	114.735.000	96,42
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	566.317.000	557.278.650	98,40
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.578.000	142.073.500	94,35
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	415.739.000	415.205.150	99,87
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.119.496.400	757.813.400	67,69
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000	34.600.000	69,20
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000	34.600.000	69,20
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.069.496.400	723.213.400	67,62
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.069.496.400	723.213.400	67,62
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	302.244.000	236.266.250	78,17
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.050.000	154.198.250	99,45

Laporan Kinerja Instansi Perjanjian Kinerja (LKJIP) Tahun 2023

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.050.000	154.198.250	99,45
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	147.194.000	82.068.000	55,75
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	147.194.000	82.068.000	55,75
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	732.976.400	731.449.100	99,79
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemiraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.450.000	120.948.500	99,59
	Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	121.450.000	120.948.500	99,59
	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Prevebtif Tngkat Daerah Kabupaten/Kota	100.828.500	100.792.750	99,96
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	52.325.900	52.296.150	99,94
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	48.502.600	48.496.600	99,99
	Pengembangan Pelaksanaan Upaya Kseshatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	510.697.900	509.707.850	99,81
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	510.697.900	509.707.850	99,81
	TOTAL	138.455.093.998	134.353.012.596	97,04

PELAKSANAAN GERAKAN CEGAH STUNTING, AKSI BERGIZI DI SEKOLAH



KOORDINASI/SOSIALISASI PROGRAM KERJA POKJANAL POSYANDU



BAB IV

P E N U T U P

LKJIP Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2023 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan hingga program-program yang kita kerjakan lebih mudah.. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 ini.

Saran :

1. Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi Pelayanan Kesehatan (baik Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan kesehatan sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan serta pelaksanaan program/kegiatan di daerah, Provinsi dan pusat.
2. Lebih memantapkan koordinasi, kerjasama dan membangun jejaring (*networking*) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan.
3. Lebih meningkatkan kegiatan promosi kesehatan terutama mengikutsertakan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sehat masyarakat.
4. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat teknis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Gunungtua, 16 Maret 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN UTARA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**dr. Sri Prihatin KN Harahap, M.K.M
PEMBINA Tk.I
NIP. 197608212009072001**

